

Book Chapter: Reposisi, Redefinisi, dan Reaktualisasi Model Baru Integrasi Keilmuan dalam Membangun Kedewasaan Beragama

Judul : Integrasi Keilmuan pada Kebijakan Pendidikan Tinggi, Membangun Kedewasaan Beragama pada Era Disrupsi
Penulis : Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag.,MH
Jabatan : Rektor IAIN Bengkulu

A. Pendahuluan

Dewasa ini integrasi keilmuan menjadi suatu tuntutan. Hal ini mengingat tidak ada suatu persoalan Islam yang dipecahkan secara monodisiplin, diperlukan pendekatan multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.¹ Di sinilah diperlukan model baru yang koheren dan kolaboratif dalam integrasi keilmuan demi membangun kedewasaan beragama. Sinkronisasi model baru adalah keniscayaan terhadap bentuk revolusi dunia yang semakin cepat. Revolusi itu setidaknya berimplikasi pada Ilmu Pendidikan dan Teknologi (IPTEK). Belum genap satu windu, aspek teknologi informasi seperti hadirnya jaringan Internet, saat ini telah memasuki era 5G.² Padahal, belum seluruhnya wilayah Indonesia, terhubung dengan jaringan 4G. Hal serupa, peradaban saat ini tengah memasuki era ‘*Society 5.0*’ yang diluncurkan Jepang pada 21 Januari 2019, era dimana peradaban manusia yang membentuk teknologi.³ Sebagai antitesis dari ‘Revolusi Industri 4.0’, dimana alat dan teknologi mempengaruhi peradaban manusia, yang eksistensinya belum genap satu lustrum. Revolusi Industri ditandai dengan masifnya digitalisasi, berkontribusi terhadap dinamika kehidupan manusia, kerap dikenal dengan istilah ‘Era Disrupsi’.

Pergeseran politik, sosial, budaya, bahkan agama, sebagai bentuk distorsi dari era disrupsi telah berimplikasi pada perkembangan kejiwaan setiap individu.

¹Mayling Oey-Gardiner, dkk, *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Jakarta) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2017).,hlm. 257

²Devy Kurnia, “Jaringan 5G Akan Diterapkan 2020”, <http://bit.ly/3eYUf3A> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 14: 24 Wib.

³Karta Rahardja Ucu, “Siapakah Indonesia Menuju Industri 5.0”, <http://bit.ly/2NvVHzm> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 14:33 Wib

Apalagi, para milineal Generasi Z'.⁴ Tassar Napitupulu menyebut Generasi Z, sebagian besar bermental instan dan merasa berat untuk menjalani proses secara disiplin dan konsisten. Terkait perubahan itu, Weber pernah menyebut adanya perubahan karakter masyarakat beragama, perubahan dari agraris ke industri, saat ini semakin kompleks dengan budaya digital. 'Alarm Merah', ketika porsi ke-Baratan lebih dominan dari porsi ke-Islaman. Perspektif Barat berimplikasi terhadap Teknologi dan Sains. Menurut Al-Attas, hal itu sebagai cikal bakal sekularisme dan individualis hedonisme saat ini. Sementara ke-Islaman berorientasi pada *ta'dib*, nilai-nilai akhlak.⁵

Jika hal penting itu tidak segera diatasi, maka konsekuensi logis dan empiris semakin juga mengubah *landscape* studi Islam. Alhasil, pendekatan paradigma juga disesuaikan dengan tantangan era digital. Misal, adanya kecenderungan masyarakat beragama sebagai *digital natives* mengkreasikan pemahamannya atas doktrin dalam bentuk tafsiran di media sosial atau media *online*, banyak dipahami secara parsial dan tidak komprehensif. Contoh lain, fatwa *online*, ngaji *online*, penggunaan aplikasi AlQur'an pada berbagai bentuk *gadget*, dan komodifikasi Islam. Karenanya, Syamsul Kurniawan menyebut, perlu model baru integrasi keilmuan guna membangun kedewasaan beragama, tanpa harus menafikkan seutuhnya pola lama.⁶ Sebagaimana tersebut dalam kaidah, "*al-Muhafadhatu 'alal qadimu shalih wal akhdzu bil jadidil ashlah*" (memelihara budaya lama yang baik dan mengambil budaya baru yang lebih baik).

Pada variabel kedewasaan beragama, perlu dikuatkan dengan integrasi keilmuan memadai. Bertocci mengistilahkan 'kedewasaan beragama' dengan adanya indikasi hubungan intim antara Tuhan dengan hambanya.⁷ Sementara itu, Pius Pandor menyebut ada dua refleksi kedewasaan beragama. Menurutny, kedua

⁴"Dear Gen Z Ini yang Harus Dipersiapkan Buat Hadapi Era Disrupsi", <http://bit.ly/2ONhoeG> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 15:30 Wib

⁵Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Problematica to the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*, (Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2014), hlm. 88, 99-108.

⁶Syamsul Kurniawan, "Tantangan Studi Islam Era Digital", <http://bit.ly/3cI4BIP> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 17:51 Wib

⁷Bertocci, Peter Anthony, *Introduction to the Philosophy of Religion*, Fourth Printing, (New York: Prentice Hall Inc, 1955), hlm. 586

variabel itu terkait penganut agama yang pluralis dan kesadaran keberagamaan.⁸ Antiklimaks kedewasaan beragama adalah pendangkalan beragama. Hendropriyono menyebut pendangkalan agama dengan radikalisme terorisme. Ia menyebut ada dua variabel yang saling berkaitan terhadap terorisme, yaitu bahasa ancam – mengancam juga bahasa doa.⁹ Adapun pendangkalan agama pada era media siber atau media baru saat ini dapat dilihat dari maraknya *hate speech*, polarisasi kelompok, dan konten kajian atau ceramah yang terkesan secara parsial dan tendensius. Fenomena Gus Nur (*alias* Nur Sugi), mendiang Maher Attuwailibi, atau eks-Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain melalui media sosial, menyisakan resiko hukum dan polarisasi konflik sosial di jagat maya. Akibat dari ketersinggungan atas ujaran verbal yang ditayangkan melalui saluran akun *Youtube* dan media sosial mereka.

Maka, penting dunia kampus menciptakan sarjana yang memiliki kedewasaan beragama, Mar’atus Sholihah menyebutnya dengan istilah ‘*Mature Religion*’. Sholihah meramu konsep itu, dengan menukil pendapat beberapa ahli, seperti: Walter Houton Clark, Gordon Allport, William James dan Wiemans. Masing-masing berpendapat, Walter Houton Clark mengungkapkan kedewasaan beragama adalah bentuk berjumpaan batin hamba dengan Tuhan, dibuktikan dengan harmonisasi kehidupan. Lalu, Gordon Allport memahami hal itu dengan adanya sikap kerendahan hati dan keterbukaan atas pandangan-pandangan keagamaan baru. Sementara, William James mengindikasikan kedewasaan agama dibuktikan dengan emosi (rasa) cinta dan harmoni. Adapun Wiemans mengistilahkan kedewasaan beragama dengan adanya kesalehan sosial.¹⁰ Sebab itu, jika para sarjana atau ilmuwan muslim yang tengah mendesiminasikan nilai-nilai moderasi beragama tidak adaptif dalam penggunaan teknologi media baru atau media siber, maka akan memperuncing problematika yang terjadi melalui media maya.

Meskipun, sebenarnya upaya membangun kedewasaan beragama perlu ditanamkan sejak usia dini. Hal itu diungkapkan oleh Zakiah Daradjat. Ia menyebut,

⁸Pius Pandor, “Fenomenologi Agama: Menuju Penghayatan Agama yang Dewasa”, Jurnal Filsafat *Arete*, Vol. 1, No. 1. (Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Khatolik Widya Mandala, 2012), hlm. 11

⁹AM Hendropriyono, “Terorsime dalam Kajian Filsafat Analitika”. Ringkasan Desertasi. (Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2009)., hlm. 52

¹⁰Mar’atul Sholihah, “*Kedewasaan Beragama pada Anak Usia Dasar*”, Jurnal Falasifa, Vol. 9 Nomor 1 Maret 2018, hlm. 98-102

bahwa perkembangan agama pada usia belia sangat ditentukan pada pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya. Ia mengungkapkan, bahwa sejak usia 0-12 tahun, merupakan fase pertumbuhan pertama dan fase pengalaman beragama pertama. Menurutnya, jika pada masa itu, seorang tidak dikenalkan dengan agama, maka setelah dewasa akan cenderung negatif terhadap agama.¹¹ Artinya, ada peran kualitas pendidikan Islam dari keluarga terlebih dahulu. Namun, bagaimana jika seseorang dibesarkan pada keadaan keluarga yang tidak harmonis dan tidak kondusif (*broken home*)? Maka, peran lembaga pendidikan dan juga lingkungan masyarakat harus menjamin keberlangsungan pendidikan dan keagamaan.

Ki Hajar Dewantara mengonsepsikan hal tersebut dengan istilah ‘Tri Sentra Pendidikan’. Menurutnya, harus ada kerjasama dan adanya kualitas pendidikan bersinergi di antara keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan masyarakat.¹² Perlu menjadi perhatian, bahwa pendidikan pada dasarnya tidak mengenal batas usia. Kecuali, pendidikan formal dapat dibatasi dengan jenjang kelas dan gelar, atau interval pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Sementara, pendidikan informal tak mengenal batas usia, kelas, dan gelar. Sebagaimana tersebut dalam adagium, ‘*Uthlubil ‘ilma minal mahdi ilal lahdi*’ (Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat). Baik pendidikan formal maupun informal, pembelajaran Agama dan Pancasila harus memiliki ruang yang proporsional.

Akhir-akhir ini, media tengah menyoroti isu hilangnya frase Agama dan Pancasila dalam draf Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Terkait hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menepis isu tersebut. Menurutnya, pembelajaran Agama dan Pancasila tidak akan dihilangkan dari peta jalan pendidikan. Selaras dengan hal itu, berbagai pihak berharap agar pembelajaran agama dan pancasila juga mempunyai porsi yang memadai dalam kebijakan Mendikbud Nadiem terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MB-KM).¹³ Namun, bias pembelajaran bernuansa agama pada

¹¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 74

¹²Siti Shafa Marwah, dkk, “*Relevansi Konsep Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara*”, Jurnal TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education – Vol. 5, No. 1, (2018), hlm. 23

¹³Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengenalkan MBKM terkait kemerdekaan belajar. Nadiem menjelaskan bahwa kemerdekaan belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai”. Lihat: *Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*, Cet-1, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI, 2020

kebijakan MB-KM perlu menjadi perhatian, karena dipahami berorientasi pada *campus industry partnership*.

Kajian agama merupakan bagian dari upaya membentuk kedewasaan beragama berada pada tantangan tersendiri dalam era globalisasi. Seluruh jenjang dan bentuk lembaga pendidikan, tak terkecuali Perguruan Tinggi, harus mampu beradaptasi. Serta, mampu menjadi pusat peradaban maju dengan integrasi ilmu dan teknologi terbaru. Probabilitas saat ini muncul, konsep integrasi keilmuan dalam upaya membangun kedewasaan beragama tidak cukup pada tataran sinkronisasi kurikulum keilmuan Barat dengan keilmuan Islam. Juga, tidak berhenti pada tataran integrasi dan interkoneksi sebagaimana Amin Abdullah mengonsepskan adanya perpaduan ragam keilmuan dalam kajian pendidikan Islam.¹⁴ Tetapi, perlu ada inovasi model kurikulum yang selaras dengan perubahan pola masyarakat digital saat ini. Tidak cukup dengan diskursus semata, namun juga perlu ada upaya konkrit sebagai bentuk implementasi model baru tersebut. Lantas, bagaimana model baru kurikulum terapan dari model integrasi keilmuan dalam membangun kedewasaan beragama yang kompatibel di tengah era disrupsi? Diskursus ini diulas secara komprehensif dan holistik melalui ulasan pada tema saat ini.

B. Inklusifitas Kebijakan Kampus terhadap Kurikulum Kolaboratif dalam Ekosistem Media Baru

Integrasi keilmuan guna menciptakan para sarjana dengan tingkat kematangan pemahaman agama dan implementasinya tidak cukup dengan konsep dan sebatas wacana. Perlu ada upaya konkrit melalui tindakan-tindakan nyata. Eviden itu memungkinkan termuat pada kerangka kurikulum perkuliahan teoritis dan terapan. Serta, hal itu perlu ditunjang dengan berbagai program akademik melalui kebijakan dari masing-masing otoritas perguruan tinggi.

Peninjauan ulang atas penerapan kebijakan kurikulum pada perguruan tinggi, hendaknya dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional. Apalagi, hal itu setidaknya dapat menyasar pada dinamika global yang ditandai dengan pesatnya era disrupsi digitalisasi. Berbagai sektor kehidupan lebih mengutamakan kegiatan berbasis *Artificial Intelligence* (kecerdasan buatan). Meskipun, tidak seluruhnya,

¹⁴H.M. Amin Abdullah, dkk, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 1-30

berbagai aspek kehidupan dapat terakomodir oleh AI. Contohnya, konflik horizontal dan konflik vertikal di masyarakat.

Sadar atau tidak, kenyataannya, sebagian dari aktivitas manusia dipengaruhi dengan keberadaan AI. Misal, muslim yang menggunakan aplikasi Alqur'an digital. Saat ini, terdapat 47 bentuk Alqur'an digital dengan berbagai nomenklatur pada aplikasi pengunduh *Google Play Store*. Seorang muslim saat ini juga dapat mengetahui arah kiblat dari *spot* dimana ia berdiri dan berdiam diri. Tidak lagi seorang muslim harus menenteng Alqur'an cetak, atau seorang muslim tidak perlu lagi menentukan arah kiblat berdasarkan bayangan matahari yang ditentukan setahun dua kali. AI mengakomodir bagaimana muslim saat menentukan arah kiblat, ia cukup mengunduh aplikasi arah kiblat pada *gadget* yang dimiliki. Maka, saat itu seseorang dapat menunaikan ibadah shalat dengan arah kiblat yang tepat. Selain itu, guna menentukan kapan waktu sholat tiba sesuai kondisi geografis, maka seorang muslim cukup mengunduh aplikasi jadwal sholat pada aplikasi pengunduh di telepon cerdasnya. Saat waktu sholat tiba, maka suara adzan akan otomatis berdering, tanpa harus seseorang menanti suara kumandang adzan dari masjid terdekat, atau sekedar melihat posisi matahari. Cara-cara konvensional begitu menyulitkan beberapa pihak, manakala terhambat oleh kondisi cuaca yang ekstrim, apalagi jika seorang pekerja berada pada sebuah ruang kantor tertutup.

Akan tetapi, tetap saja, individu senantiasa membutuhkan eksistensi kecerdasan kemanusiaan (*Humanity Intelligence/HI*). Pada aspek kosmopolis, seorang muslim tetap saja butuh rohaniawan, baik difungsikan sebagai penasihat spiritual, maupun pembimbing mental kerohanian. Pada dasarnya, sosok mereka, merupakan pemegang otoritas keilmuan seutuhnya yang tidak dapat digantikan dengan hadirnya berbagai bentuk AI.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berada pada tantangan serius. Kemajuan AI dan media baru (*New Media/Cybermedia*)¹⁵ sedang mendisrupsi berbagai sektor. Sebagai kampus Islam, tentu hal ini menjadi tantangan serius. Jika kesemuanya dilakukan secara luring, maka peluang menjaga kesakralan tetap ada.

¹⁵Representasi media baru dicontohkan dengan adanya rapat virtual melalui Zoom Meeting, Google Meetings, Video Call WhatsApp, Video Massangers, dll. Juga ada bentuk lain, seperti: *Social Networking, Blog, Microblogging, Media Sharing, Social Bookmarking, Wiki*. Lihat: Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 39-49

Ironisnya, nilai-nilai kesakralan semakin bias pada media baru. Karena, hampir seluruh sektor dikerjakan melalui medium Internet. Proses *Ngaji Online*, kuliah dalam jaringan (Daring), setoran hafalan dengan perangkat media *online*, dan sebagainya. Apalagi, eksistensi pendidikan agama secara masif menggunakan perangkat media siber saat pandemi Covid19¹⁶ menerpa. Philip Kotler menyebut, sebenarnya dunia sedang pada masa transisi dan berada pada periode adaptasi. Tetapi, menurutnya pandemi Covid19 telah mengakselerasi berbagai sektor, tak terkecuali digitalisasi pada sektor usaha. Philip Kotler menyebutnya dengan istilah *Marketing 5.0: Technology for Humanity*.¹⁷

Pada dimensi tertentu, tidak seutuhnya kegiatan bernuansa religi terakomodir seluruhnya oleh hadirnya media baru. Pada kegiatan peribadatan bagi penganut Islam, khususnya ibadah langsung (*mahdhah*), seperti shalat, pelaksanaan sholat Jum'at, bahkan Haji dan Umroh, tetap tidak dapat dijalankan hanya melalui media baru. Pada Jum'at, 19 Maret 2021, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI KH Muhammad Cholil Nafis mengatakan tidak sah sholat Jum'at melalui media baru, atau secara virtual.¹⁸ Maksudnya, para jamaah mendengarkan khutbah dan sholat Jumat dari tempat masing-masing secara terpisah, dengan hanya melalui aplikasi *Video Teleconference Zoom Cloud Meetings* yang dianggap sah oleh peserta, padahal itu tidak diperbolehkan sama sekali, batal dan tidak memenuhi ketentuan.

Sebab itu, suasana akademik pada kampus PTKIN harus merespon berbagai bentuk seperti itu, khususnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. IAIN Bengkulu selalu mendorong civitas akademika untuk dapat menciptakan proses akademik yang nantinya melahirkan para sarjana solutif terhadap problematika Islam kontemporer. Salah satunya menerapkan sistem pengajaran *hybrid*. Sistem ini menawarkan pola dimana sebagian beban akademik mahasiswa diikuti secara tatap muka, sedangkan sebagian dari beban akademik diperoleh melalui perkuliahan secara daring. Ada esensi lain dari tatap muka, salah satunya untuk berinteraksi

¹⁶Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Lihat: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).

¹⁷Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, *Marketing 5.0: Technology for Humanity*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2021).

¹⁸Rizky Suryarandika, "Cholil Nafis: Sholat Jum'at Daring tidak Sah", <http://bit.ly/3faPHHA>. Diakses: 23 Maret 2021, Pukul. 20:45 Wib

dengan mahasiswa lain dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Hal itu akan menumbuhkan solidaritas sosial dan membentuk kepribadiannya, bermanfaat bagi dirinya saat di dunia kerja dan di masyarakat.¹⁹

Para ilmuwan Islam, harus mampu melahirkan produk *ijtihad* sebagai langkah preventif terhadap pola-pola keagamaan baru akibat disrupsi teknologi media siber. Contoh pada bidang fikih *muamalah*, masa pandemi Covid19, grafik jual beli secara *online* mengalami kenaikan pesat. Pada saat adanya pembatasan interaksi sosial dan adanya imbauan isolasi terbatas, melatarbelakangi peningkatan angka penjualan *online*. Karena, seseorang tidak perlu harus pergi ke pusat perbelanjaan atau ke pasar yang notabene sebagai pusat keramaian dan kerumunan yang berisiko terhadap penularan virus. Mereka cukup memanfaatkan transaksi virtual melalui berbagai *platform* aplikasi jual beli. Dinamika seperti ini harus dapat ditanggapi secara teoritis oleh para sarjana.

Pada dasarnya, hal seperti itu diperbolehkan. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat saat proses jual belinya. Transaksi *online* dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, khususnya dianalogikan dengan prinsip transaksi *assalam*, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.²⁰

Contoh lain, sidang perkara pelanggaran protokol kesehatan terhadap terdakwa kasus kerumunan Rizieq Shihab digelar secara virtual. Rizieq Shihab harus mengikuti persidangan secara daring. Rizieq Shihab menolak dan melakukan protes terbuka terhadap majelis hakim, karena ia bersikukuh wajib hadir di persidangan secara tatap muka. Akhirnya Rizieq Shihab *walk out* dari layar virtual pada persidangan perdana.²¹ Majelis hakim menilai persidangan secara virtual tetap sah dan tidak mengubah ketentuan persidangan. Menurutnya, persidangan daring sama halnya dengan persidangan luring tanpa sedikit pun mengurangi esensi. Melalui fenomena seperti ini,

¹⁹Mayling Oey-Gardiner, dkk, *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*, hlm. 255

²⁰Langah-langkah agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut Islam, antara lain: Produk halal, kejelasan status, kesesuaian harga dengan kualitas barang, serta kejujuran. Tentu, melalui prinsip *akad salam*, lihat: Munir Salim, “Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam, Jurnal Al-Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember 2017., hlm. 385

²¹Theresia Ruth Simanjuntak, “Aksi Walk Out Rizieq Shihab Merendahkan Martabat Majelis Hakim dan Peradilan”, <http://bit.ly/3tNtezC>. Diakses: 23 Maret 2021, Pukul. 21:03 Wib

mahasiswa dan dosen harus mulai menganalisis dalam diskursus akademis dari problematika yang muncul akhir-akhir ini. Seperti, problem konvergensi yang sebenarnya di dalamnya memuat Keilmuan, ke-Islaman, dan Kebangsaan.

Oleh sebab itu, komitmen IAIN Bengkulu terhadap integrasi keilmuan, ke-Islaman dan kebangsaan tertuang dalam Rencana Strategis 2018-2022. Secara implementatif, komitmen itu diimplementasikan dalam berbagai program, terutama pada program pengembangan *Community Based Research* (CBR), *Collaborative Action Research* (PAR), *Collaborative Research* tematik khusus di integrasi Keislaman dan Kebangsaan.²² Selain itu, momentum transformasi alih status IAIN Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Soekarno Bengkulu juga sebuah upaya implementatif dari kebijakan kolaboratif.

Pada masa depan, secara bertahap UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu berupaya mengembangkan program studi (Prodi) umum dan kekuatannya dalam mengintegrasikan Keislaman dengan ilmu-ilmu lain, dirancang dengan pengusulan berbagai prodi umum. Hal tersebut dapat dideskripsikan dengan adanya prodi Hukum Internasional yang diintegrasikan dengan perkembangan hukum Islam Internasional, misalnya pembagian WNI yang meliputi kafir *harbi*, kafir *zimmi*, kafir *mu'ahadah* dan kafir *musta'man*. Selain itu, prodi Teknologi Hasil Peternakan memiliki kekuatan integrasi dengan muatan pemberlakuan UU Produk Halal/Jaminan Produk Halal, didirikannya Halal *Centre* sebagai labolatorium, bahkan pengembangan budi daya ternak monyet untuk komoditas ekspor. Lalu, ada prodi Kedokteran Hewan yang didalamnya juga memuat konsep integrasi keilmuan yakni berupaya mendidik para calon dokter ahli hewan berbasis syariah, berbekal kompetensi keilmuan dalam memelihara, memotong, mengolah, mengemas dan mendistribusikan sesuai syariah guna terjaminnya mutu kehalalannya. Kemudian, adanya prodi Teknologi Hasil Laut dan Perikanan, hal ini melahirkan ahli dengan kompetensi pengolahan hasil laut dan perikanan sesuai prinsip ramah lingkungan, sebagaimana tertuang pada fikih lingkungan (*Fiqh al-Bi'ah*).²³ Tentu, pada tataran proses akademis, akan disinkronkan dengan pola kurikulum baru, seperti penyesuaian terhadap rancangan kebijakan MB-KM. Serta, pada kerangka penyusunan Rencana Pembelajaran Semester harus terintegrasi dan terorientasikan dengan teknologi

²²Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2018-2022)

²³Proposal IAIN Menuju UIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019.,hlm.

AI dan media baru di era disrupsi Revolusi Industri 4.0 dan keseimbangan peradaban manusia di era *Society 5.0*.

C. Riset Kolaboratif dan Model Baru Integrasi Keilmuan

PTKIN memiliki porsi besar untuk mendiskusikan perspektif keilmuan umum dan Keislaman. Kedua unsur tersebut dapat saling berkontribusi. PTKIN harus mampu menstimulus dua unsur yang koheren tersebut, melalui ragam penelitian kolaboratif. Para dosen dan mahasiswa diorientasikan pada berbagai pendekatan, melalui logika berpikir holistik dan komprehensif. Sehingga, stimulus tersebut dapat mengakselerasi peneliti atau penulis dalam memahami fenomena agama dan sosial secara komprehensif. Mereka akan berjuang mencari relevansi-relevansi guna menguatkan argumentasi terhadap apa yang menjadi objek kajian.

Terkait hal itu, ada berbagai literasi, salah satunya Imam Subchi berupaya untuk mengintegrasikan berbagai kisah dalam al-Qur'an dengan berbagai konsep penting perspektif antropologi ala Koentjaraningrat. Koentjaraningrat mengungkapkan ada tujuh unsur kebudayaan sebagai pokok etnografi, seperti: bahasa, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan mata pencaharian, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, kesenian, dan religi. Melalui pendekatan *cross culture*, didapatkan banyak kesamaan antara tujuh unsur kebudayaan Koentjaraningrat dengan kisah-kisah dalam al-Qur'an.²⁴ Diskursus itu menghasilkan berbagai kisah historis dan antropologis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Contoh keselarasan tersebut relevan dengan pandang A.M Saefuddin. Menurutnya, integrasi merupakan proses pelarutan yang tidak hanya bercampurnya unsur Barat dan Islam. Integrasi keilmuan yang dapat mempertajam kedewasaan beragama adalah upaya menghubungkan kembali *sunnat Allah* (hukum alam) dengan Alqur'an, karena keduanya merupakan ayat Tuhan. Sebagaimana diketahui, terdapat dua jenis ayat-ayat tersebut, yaitu: *pertama*, Alqur'an bersifat linguistik dan verbal serta berbahasa insani. *Kedua*, fenomena atau gejala alam semesta.²⁵

²⁴Imam Subchi, *Antropologi Alqur'an: Integrasi Keilmuan Kisah-Kisah Alqur'an*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 6, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 44

²⁵A. Khudori Soleh, "Pokok Pikiran tentang Paradigma Integrasi Ilmu dan Agama", dalam M. Lutfi Musthofa dan Helmi Syaifuddin, *Intelektualisme Islam Melacak Akar-Akar Integrasi Ilmu dan Agama*, (Malang: Lembaga Kajian Alqur'an dan Sains UIN Malang, 2006)., hlm. 231-232

Berbagai kajian dan penelitian, harus mampu menggambarkan bangunan struktur keilmuan memadai. Kampus harus mampu menjadi fasilitator dan memediasi berbagai kerangka keilmuan, seperti hadirnya ilmu sosial profetik, ilmu alam profetik, serta budaya dan humaniora profetik. Pada akhirnya, akan melahirkan para sarjana atau ilmuwan Islam yang multidisipliner dalam proses pengembangan masyarakat. Sehingga, tidak hanya melahirkan ilmuwan seperti di atas, yakni upaya sinergi yang konfirmatif dalam integrasi kisah-kisah Alqur'an terhadap konsep pokok Antropologi perspektif Koentjaraningrat. Tetapi juga, ilmuwan dapat mendiskusikan ilmu tafsir Alqur'an dengan pendekatan fenomenologi, ilmu hadis dengan fenomenologi, ilmu Tarbiyah dengan sosiologi pendidikan Islam, teknologi pendidikan Islam, politik pendidikan Islam dan sebagainya.²⁶

Integrasi keilmuan harus memberikan porsi seimbang terhadap kedua unsur. Keseimbangan dan keselarasan tercermin dari bagaimana para sarjana memosisikan kedua unsur secara proporsional. Misal, seorang sarjana pada bidang ilmu fikih harus memiliki pengetahuan multidisiplin ilmu. Saat mengajarkan bab tentang *thoharoh* atau bersuci, maka ia harus mampu mendeskripsikan salah satu alat dalam bersuci, semisal tentang air. Tentu, sudah pasti sarjana fikih akan mengulas jenis air, diketahui ada air *mutlak*, *musta'mar*, dan *mutanajjis*. Pada perspektif integrasi keilmuan, ia harus mampu mengejawantahkan pengetahuan air dari sisi sains, sebagaimana hasil riset Masaru Emoto. Masaru Emoto pernah mengungkapkan, bahwa air punya partikel kristal. Partikel kristal indah jika seseorang merespons air dengan sugesti baik. Jika seseorang respon negatif, maka air susah membentuk partikel kristal terbaik.²⁷

D. Integrasi Keilmuan, dan Adaptasi PTKIN terhadap Kebijakan MB-KM

Sebagaimana penulis kemukakan sebelumnya, bahwa integrasi keilmuan tidak hanya berkuat pada upaya peleburan dua unsur berbeda. Tetapi, ada upaya rekoneksi dan rekognisi hukum alam dan kaidah Islam. Tapi, sudah tidak lagi pada taraf konseptual atau diskursus semata. Melainkan, bagaimana secara aplikatif dapat dibuktikan dengan formula inovatif.

²⁶Husniyatus Salamah Zainiyati, "Landasan Fondasional Integrasi Keilmuan", Jurnal Islamica, Volume 10, Nomor 1, September 2015., hlm. 270

²⁷Syahrial Labaso, *Paradigma Integrasi-Interkoneksi di tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan*, Jurnal AL-A'RAF – Vol. XV, No. 2, Juli – Desember 2018, hlm. 349

PTKIN harus adaptif dan inovatif terhadap hal-hal yang baru. Penggalan dan pendalaman bidang keagamaan Islam adalah *fardlu 'ain*. Tapi penyelarasan kemampuan atas progresifnya teknologi dan sains juga harus *fardlu 'ain*. Jika demikian, maka ada upaya serius dari berbagai pihak. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta peserta didik harus dalam satu tarikan nafas adaptasi dan inovasi terhadap kebaruan.

Para pejabat aselon harus selalu merevisi dengan cepat terhadap pola-pola baru. Jika tidak, disparitas mutu pendidikan akan semakin menganga. Artinya, harus ada perubahan besar terhadap *mindset*, *workset*, dan *lifeset* dalam tata kelola dan tata kerja di PTKIN. Salah satunya, merespon cepat kebijakan MB-KM dengan segera membuat pedoman penerapannya. Tentu, tetap harus mempertimbangkan dan menyelaraskan sesuai mekanisme aturan dan kebijakan yang berlaku. Pada era kompetitif, PTKIN harus mampu *berdiri sama tinggi, duduk sama rendah* terhadap kampus umum lainnya.

Menyoal adanya penerapan kebijakan MB-KM yang berangkat dari kebijakan Mendikbud, maka perlu menjadi pijakan pengembangan di PTKIN. Selain itu, hal demikian juga sekaligus menjadi ajang evaluasi Integrasi Keilmuan, Keislaman, dan Kebangsaan. Evaluasi dari kebijakan MB-KM pada dasarnya akan berorientasi pada teoritis atau berorientasi pada praktik, atau bahkan berorientasi pada keduanya. Atau, beberapa dari item kebijakan MB-KM telah diterapkan oleh PTKIN, sehingga hanya perlu pengembangan saja. Kemudian, terkait porsi khasanah Islam, apakah mempunyai porsi memadai dan berimbang?

Salah satu program dari kebijakan MB-KM adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. Kebijakan itu didasarkan pada upaya menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga dengan masa depan yang berubah begitu cepat. Adapun program utamanya, yaitu: kemudahan pembukaan prodi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) juga PTKIN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar prodi. Menurut kebijakan MB-KM, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar prodi, tiga semester berupa satu semester

kesempatan mengambil mata kuliah di luar prodi dan dua semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.²⁸ Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 Ayat 1 tentang bentuk kegiatan yang dapat dilakukan di dalam prodi dan di luar prodi, meliputi: pertukaran pelajar, magang praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Bentuk kegiatan dari kebijakan MB-KM berjumlah delapan kegiatan.

Pertama, pertukaran mahasiswa (*Student Exchange*). Urgensi kegiatan ini untuk menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Terdapat tiga model pertukaran pelajar dalam kebijakan ini, yakni: *Pertama*, pertukaran mahasiswa antar Prodi pada Perguruan Tinggi yang sama. *Kedua*, pertukaran mahasiswa dalam prodi sama pada perguruan tinggi berbeda. *Ketiga*, pertukaran mahasiswa antar prodi pada perguruan tinggi berbeda. IAIN Bengkulu juga kampus yang terhimpun dalam PTKIN telah melakukan program pertukaran mahasiswa, terutama ke perguruan tinggi luar.

Kedua, magang/praktik kerja. Menurut kebijakan MB-KM, selama ini mahasiswa kurang mendapat pengalaman kerja di industri/dunia profesi nyata sehingga kurang siap bekerja. Sementara, magang yang berjangka pendek (kurang dari 6 bulan) sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan atau lembaga yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di Industri. Oleh sebab itu, program kebijakan MB-KM memberikan pengalaman cukup kepada mahasiswa selama satu hingga dua semester. Terkait hal ini, MB-KM menstimulus kampus untuk melakukan kerjasama kemitraan terhadap perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*).

Ketiga, asistensi mengajar di Satuan Pendidikan. Menariknya, program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum

²⁸Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka., hlm. 2

Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan berbagai program lain yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Asistensi mengajar dapat diterapkan di lembaga pendidikan formal dan pendidikan non formal. Selama ini asistensi mengajar masih pada tataran regional dan lokal, belum berafiliasi pada berbagai asosiasi dengan gerakan lainnya, seperti program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan berbagai program lainnya.

Keempat, riset atau penelitian. Kebijakan MB-KM memberikan peluang besar bagi mahasiswa untuk magang di laboratorium pusat riset. Hal ini dapat mengkomodir kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset jangka pendek berdurasi satu semester hingga satu tahun. Beberapa kampus PTKIN telah menerapkan kolaborasi penelitian dosen dan mahasiswa. Namun, masih dalam tataran internal kampus semata, belum merambah dengan jalinan kemitraan dengan lembaga riset atau laboratorium riset di luar kampus.

Kelima, proyek kemanusiaan. Gerakan kemanusiaan di kalangan mahasiswa dalam Perguruan Tinggi memang sudah lama dan eksistensinya tidak diragukan lagi. Namun, hal itu masih bersifat sukarelawan (*voluntary*) dan hanya berjangka pendek. Padahal, banyak lembaga Internasional telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia meskipun telah masuk menjadi bagian negara maju. Proyek kemanusiaan dengan jalinan kemitraan dengan organisasi Internasional memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menjadi '*foot soldiers*' di dalam dan luar negeri. Artinya, gerakan kemanusiaan yang selama ini bersifat tematik dan temporal seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Maka, pada masa depan sudah mulai berevolusi dengan gerakan kemanusiaan empiris. PTKIN dapat berpartisipasi pada upaya *trauma healing* terhadap para pencari suaka, konflik sosial Rohingnya, krisis kelaparan di Ethiopia, dan lain sebagainya. Artinya, ruang eksistensi mahasiswa terhadap program kemanusiaan diperluas melalui kerjasama kemitraan dengan organisasi internasional, seperti *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (UNESCO), *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *World Health Organization* (WHO), dan lain-lain.

Keenam, kegiatan wirausaha. Selama ini, wirausaha diajarkan sebagaimana termaktub dalam kebijakan di setiap prodi. Gambaran dari program ini, misal, mahasiswa Ilmu Komunikasi mengambil bentuk kegiatan pembelajaran berupa Kewirausahaan untuk menambah kompetensinya di bidang wirausaha. Kompetensi yang telah dicapai melalui serangkaian proses kegiatan pembelajaran kewirausahaan ini sesuai dengan capaian lulusan, diekuivalensikan terhadap mata kuliah Kewirausahaan Sosial, Etika Bisnis, Pengantar Manajemen dan Bisnis, Pemasaran Digital, Desain Wirausaha dan Presentasi, Praktik Wirausaha, serta Laporan Wirausaha dan Presentasi. Kesemuanya itu setara dengan 20 SKS.

Ketujuh, studi atau proyek independen. Studi atau proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil, tapi ekuivalen dengan silabus prodi. Bentuk seperti ini diwajibkan mahasiswa untuk membuat proposal kegiatan studi independen lintas disiplin, melaksanakan studi itu, hingga menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional dan internasional. Sementara itu, pihak kampus menyediakan tim dosen pembimbing untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.

Kedelapan, membangun desa melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). KKNT sebagai cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah. Selama ini PTKIN telah melaksanakan program KKNT. Tetapi, Satuan Kredit Semester (SKS) belum dapat diakui sesuai dengan program Kampus Merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6-12 bulan, atau 20-40 SKS. Saat pelaksanaan, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Hal ini merupakan peluang menarik, PTKIN dapat menjalin kerjasama dengan Kementerian Desa Terluar dan Tertinggal (PDDT). Efektivitas penggunaan dana desa guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi masih perlu ditingkatkan, salah satunya melalui mahasiswa yang dapat menjadi kekuatan sumber daya manusia terhadap optimalisasi pemberdayaan dana desa selama ini. Selama satu hingga dua semester mereka akan menjalankan bentuk kegiatan seperti ini. Mereka akan mengikuti

berbagai model pilihan, yakni: Model KKNT yang Diperpanjang, Model KKNT Pembangunan dan Pemberdayaan Desa, dan Model KKNT Mengajar di Desa. KKNT versi MB-KM mengakomodir mahasiswa multidisiplin ilmu, sama dengan bentuk KKNT yang selama ini berlaku.

Berdasarkan delapan bentuk kebijakan program MB-KM, tidak secara konkrit menjelaskan langkah-langkah untuk mengakomodasi integrasi keilmuan dan ke-Islaman dalam upaya pendewasaan beragama. Bahkan, terkesan ada dominasi bias religiusitas. Bias religiusitas tersebut akan terlihat absolut, manakala tidak terakomodir secara riil. Muhajir Effendi pernah mengulas, bahwa padahal pada fase awal adanya perguruan tinggi, dominasi agama cukup terlihat jelas. Simbol-simbol agama justru menjadi sentra perhatian mahasiswa, bahkan menjadi ikon kampus. Tidak hanya tercermin pada hal simbol fisik semata, tetapi juga tercermin pada intervensi *magistar* dalam menyusun perkuliahan. Mereka para *magistar* adalah para rohaniawan atau mereka yang pro terhadap gereja. Tipe itu dikenal dengan tipe *university magistorum*. Di sisi lain, ada kampus dengan tipe *university studiorum*. Pada tipe ini, dominasi agama mulai memudar dan bias. Mahasiswa bebas memilih jenis studi dan dosen perkuliahan. Ilmu sekuler, seperti filsafat Yunani mulai penetrasi di berbagai kampus. Gereja tidak lagi menjadi pusat hiruk pikuk kampus, bangunannya berada di tempat yang tersisih. Hingga saat ini, menurut Muhajir Effendi, kampus-kampus negeri, terbesar, tertua hingga kini tak memiliki masjid besar dan sentra.²⁹

Pada PTKIN, otentifikasi simbol agama diharapkan tetap menjadi prioritas. Bahkan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani mengharapkan para civitas akademika ‘pribumi’ harus dipertahankan dan dikembangkan. ‘Pribumi’ yang dimaksud, yakni civitas akademika dalam kategori USTAD (Ushuluddin, Syariah, Tarbiyah, Adab, dan Dakwah).³⁰ Mereka dipertahankan meskipun terdapat prodi-prodi baru yang dikembangkan. Dengan tetap memperhatikan integrasi Keilmuan, Ke-Islaman, dan Kebangsaan yang berkolaborasi dengan kebijakan MB-KM. Harapannya, nilai-nilai otentik dan simbol Islam dalam PTKIN tidak boleh

²⁹Muhadjir Effendi, *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Aktualisasi Kampus Religius*, Editor: Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri – Cet 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.,hlm. 207 – 209

³⁰Pernyataan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.T.,M.T saat memberikakan kuliah umum di IAIN Bengkulu, Jum’at, 26 Maret 2021.

bias, dan tetap menjadikan warna religiitas lebih dominan, terlebih di era pasar bebas dan *society 5.0*.

E. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu ada langkah-langkah konkrit dalam upaya implementasi model baru kebijakan terapan dari model integrasi keilmuan dalam membangun kedewasaan beragama yang kompatibel di tengah era disrupsi, sebagai berikut:

Pertama, integrasi keilmuan harus mampu diejawantahkan dalam dunia teoritis dan praktis akademik. PTKIN harus segera membuat panduan atau pedoman akademik berkaitan dengan langkah-langkah implementatif. Panduan atau pedoman akademik tetap mengacu pada Kurikulum Nasional Berbasis Kompetensi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Tahun 2019 dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) disinergikan dengan perangkat kebijakan MB-KM.

Kedua, kebijakan MB-KM membantu menstimulus PTKIN untuk segera beradaptasi dengan berbagai inovasi dalam berbagai hal di era disrupsi, meliputi: sarana dan prasarana digitalisasi dan komputerisasi. Penguatan SDM bagi para tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam hal penguasaan teknologi dengan melakukan perluasan dan pengembangan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait, secara konsisten dan berkesinambungan. Kampus bersiap menjadi *World Cyber University*.

Ketiga, PTKIN harus mampu menstimulus produk riset, secara mandiri dan atau kolaborasi berkaitan dengan dinamika sosial keagamaan di tengah era disrupsi media baru. Hal itu dapat dilakukan dengan bersinergi kepada lembaga riset nasional atau laboratorium.

Keempat, PTKIN harus mampu menjamin bentuk kerjasama kemitraan dengan berbagai perusahaan, lembaga nirlaba, atau institusi pendidikan formal dan non formal dengan tetap mengutamakan sisi religiusitas sebagai perangkat utama.

Kelima, PTKIN harus tetap mampu mempertahankan sisi integrasi Keilmuan, Keislaman dan Kebangsaan, meskipun secara kelembagaan telah bertransformasi dari status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) ke IAIN, dan dari IAIN menuju UIN. Pengembangan fakultas dan prodi baru tetap harus mempertimbangkan aspek Integrasi Keilmuan, Keislaman, dan Kebangsaan. Sebagaimana diketahui,

bahwa PTKIN memiliki misi baru, yakni: *The center of excellent of Islamic Studies, Producer of Islamic Scholar, Guard of islamic values, The light of Islamic massage, dan Spirit of Islamic Civilization.*

Sumber Rujukan

Buku dan Jurnal

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Problematika to the Metaphysis of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam*. Malaysia: University Teknologi Malaysia, 2014.
- Bertocci, Peter Anthony, *Introduction to the Philoshophy of Religion*, Fourth Printing. New York: Prentice Hall Inc, 1955.
- Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka*. Cet-1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. 2020
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Effendi, Muhadjir. *Dinamika Pemikiran Islam di Perguruan Tinggi: Aktualisasi Kampus Religius*, Editor: Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri – Cet 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.,hlm. 207 – 209
- Gardiner, Mayling Oey, dkk. *Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia*. Jakarta: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017.
- Hendropriyono, AM. “Terorsime dalam Kajian Filsafat Analitika”. Ringkasan Desertasi. Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Kotler,Philip, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. *Marketing 5.0: Technology for Humanity*. New Jersey: John Wiley & Sons,Inc, 2021
- Labaso, Syahrial. *Paradigma Integrasi-Interkoneksi di tengah Kompleksitas Problem Kemanusiaan*, Jurnal AL-A’RAF – Vol. XV, No. 2, Juli – Desember 2018.
- Marwah, Siti Shafa, dkk. “*Relevansi Konsep Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara*”. Jurnal TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education – Vol. 5, No. 1. 2018.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015
- Pandor, Pius. “Fenomenologi Agama: Menuju Penghayatan Agama yang Dewasa”. Jurnal Filsafat *Arete*. Vol. 1, No. 1. Surabaya: Fakultas Filsafat Universitas Khatolik Widya Mandala, 2012.
- Pernyataan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdhani, S.T.,M.T saat memberikan kuliah umum, bertema, “Transformasi dan Cyber University” di IAIN Bengkulu, Jum’at, 26 Maret 2021.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19).
- Proposal IAIN Menuju UIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2019.
- Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu (2018-2022)

- Salim, Munir. "Jual Beli secara Online menurut Pandangan Hukum Islam". Jurnal Al-Daulah. Vol. 6, No. 2, Desember 2017.
- Sholihah, Mar'atul. "*Kedewasaan Beragama pada Anak Usia Dasar*". Jurnal Falasifa. Vol. 9 Nomor 1 Maret 2018
- Soleh, A. Khudori "Pokok Pikiran tentang Paradigma Integrasi Ilmu dan Agama", dalam M. Lutfi Musthofa dan Helmi Syaifuddin, *Intelektualisme Islam Melacak Akar-Akar Integrasi Ilmu dan Agama*, Malang: Lembaga Kajian Alqur'an dan Sains UIN Malang, 2006.
- Subchi, Imam. *Antropologi Alqur'an: Integrasi Keilmuan Kisah-Kisah Alqur'an*. Jurnal Ilmu Ushuluddin, Volume 6, Nomor 1, Januari 2019.
- Zainiyati, Husniyatus Salamah. "Landasan Fondasional Integrasi Keilmuan". Jurnal Islamica. Volume 10, Nomor 1, September 2015

Internet

- Kurnia, Devy. "Jaringan 5G Akan Diterapkan 2020". <http://bit.ly/3eYUf3A> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 14: 24 Wib.
- Kurniawan, Syamsul "Tantangan Studi Islam Era Digital", <http://bit.ly/3cI4BIP> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 17:51 Wib
- Simanjuntak, Theresia Ruth. "Aksi *Walk Out* Rizieq Shihab Merendahkan Martabat Majelis Hakim dan Peradilan", <http://bit.ly/3tNTEzC>. Diakses: 23 Maret 2021, Pukul. 21:03 Wib
- Suryarandika, Rizky. "Cholil Nafis: Sholat Jum'at Daring tidak Sah", <http://bit.ly/3faPHHA>. Diakses: 23 Maret 2021, Pukul. 20:45 Wib
- Ucu, Karta Rahardja. "Siapkah Indonesia Menuju Industri 5.0", <http://bit.ly/2NvVHzm> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 14:33 Wib
- "Dear Gen Z Ini yang Harus Dipersiapkan Buat Hadapi Era Disrupsi", <http://bit.ly/2ONhoeG> Diakses: 16 Maret 2021, Pukul. 15:30 Wib